

## ANALISIS KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013 – 2017

M. Arif<sup>1</sup> dan Fefri Indra Arza<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

<sup>2</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: m.arif29k@gmail.com

---

**Abstract:** *This study aims to look at regional financial independence, effectiveness of local government finance, efficiency and expenditure harmony on allocation of capital expenditure. The population in this study are all regency/city in Sumatera Barat as many as 19. The sample in this study using a sampling technique total sampling. Analyses were performed using multiple regression models. the results showed that partially, regional financial independence positive effect does not significantly on allocation of capital expenditure, effectiveness negative effect does not significantly on allocation of capital expenditure, efficiency positive effect significantly on allocation of capital expenditure, expenditure harmony positive effect significantly on allocation of capital expenditure, simultaneously regional financial independence, effectiveness of local government finance, efficiency and expenditure harmony significant effect on allocation of capital expenditure*

**Keyword:** *Regional Financial Independence; effectiveness Local Government Finance; efficiency Expenditure Harmony; allocation of Capital Expenditure*

### How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)

Arif M dan Arza, Fefri Indra. (2019). Analisis Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1) Seri A, 35-49.

---

### PENDAHULUAN

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Daerah).

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah

daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Kuncoro, 2004). Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja modal.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan anggaran belanja modal erat hubungannya dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan berat keuangan) karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. (sumbar.antarnews.com)

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) juga masih berjalan lambat. Catatan pemerintah, capaian belanja tak langsung sepanjang semester I-2017 baru 38,54 persen dari alokasi belanja yang tertuang dalam APBD 2017 yakni sekitar Rp 6,2 triliun. Sementara, belanja langsung termasuk belanja modal baru 31,96 persen. Tak hanya itu, sebagian besar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru membelanjakan 20 persen anggaran belanja yang dialokasikan ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Pada APBD 2018, proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di beberapa Kabupaten/Kota dan juga provinsi masih berada dibawah Belanja Modal rata-rata nasional. (<http://m.valora.co.id>). Sehingga penelitian tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah dan PAD terhadap alokasi belanja modal menjadi menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk diteliti tentang bagaimana peran kinerja keuangan mempengaruhi keputusan pengalokasian anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang (1) pengaruh Efektivitas PAD terhadap Alokasi Belanja Modal, (2) pengaruh Efisiensi Belanja Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal, (3) pengaruh Keserasian Belanja terhadap Alokasi Belanja Modal, (4) Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah dan Keserasian Belanja secara bersama-sama terhadap Alokasi Belanja Modal. Bagi Pemerintah, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya kinerja keuangan daerah dan dalam hal pengalokasian belanja Modal. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam hal mengukur dan menganalisa kinerja keuangan dan pengalokasian belanja Modal pada Provinsi Sumatera Barat. Bagi Pihak-Pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

## **REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Keuangan Daerah**

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2004) dalam Bukunya “Akuntansi Keuangan Daerah” mengartikan sebagai berikut: ”Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

### **Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2007) Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut “Rasio KKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

### **Efektifitas PAD**

Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektifitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektifitas. Pengertian efektifitas sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) adalah bahwa “Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif”. Rasio efektifitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

### **Efisiensi Belanja Daerah**

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui suatu kegiatan pemerintah apakah sudah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Senada dengan hal tersebut Mahmudi (2010) mengatakan bahwa untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang

dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung realisasi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu data tentang biaya pemungutan PAD.

### **Belanja Modal**

Menurut Warren (2008), Belanja Modal adalah biaya akuisisi atas aset tetap, biaya atas penambahan atau perbaikan pada aset tetap sendiri yang meningkatkan nilai total aset, atau memperpanjang umur manfaatnya. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

### **Penelitian Terdahulu**

Dinarossi dan Darma (2016), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal. tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari efisiensi dan kemandirian keuangan daerah terhadap belanja modal di wilayah Sumatera bagian selatan. Variabel independen terdiri dari variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah serta variabel belanja modal sebagai variabel dependen. Model analisis penelitian menggunakan regresi berganda dengan model estimasi Fixed Effect. Kemudian melakukan evaluasi atau uji spesifikasi model dengan kriteria ekonometrika, kriteria statistik dan kriteria ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Gerungan, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara pada tahun berikutnya. Pada penelitian ini data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasilnya memperlihatkan bahwa secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Efektifitas Belanja Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi Belanja Modal.

Suwandi dan Afrizal (2015), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan fiskal, kemandirian finansial, efektivitas pendapatan asli daerah (PAD), dan tingkat kontribusi BUMD terhadap belanja modal alokasi rasio. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan fiskal memiliki pengaruh negatif pada alokasi belanja

modal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD derajat tidak mempengaruhi alokasi belanja modal.

## **Pengembangan Hipotesis**

### **1. Hubungan antara Kemandirian dengan Belanja Modal**

Saat ini kondisi kemandirian Pemerintah Daerah belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Saliman (2016), kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera masih sangat rendah, hal ini memperlihatkan bahwa daerah Kabupaten di Pulau Sumatera masih sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat. Utomo (2012) dalam Suwandi (2015), mengindikasikan kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis, upaya ini lebih dipilih daripada meningkatkan PAD secara signifikan. Dinarossi (2016) menyatakan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja Modal. Berdasarkan argumen tersebut maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H1:** Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal

### **2. Hubungan antara Efektifitas PAD dengan Alokasi Belanja Modal**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan maka semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Yustikasari dan Darwanto (2007), mengemukakan bahwa PAD akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mengalokasikan Belanja Modal. Berdasarkan argumen di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2:** Efektifitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **3. Hubungan antara Efisiensi Keuangan dengan Alokasi Belanja Modal**

Adanya desentralisasi fiskal mengharuskan setiap daerah untuk mampu mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Apabila pengeluaran daerah lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah maka daerah tersebut dapat dikatakan efisien pada keuangan daerahnya. Semakin kecil nilai efisiensi berarti semakin efisien suatu daerah dan mengindikasikan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Efisiennya suatu daerah diharapkan juga berdampak pada nilai pengalokasian Belanja Modalnya sebagai wujud pembangunan daerah. Dinarossi (2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel Efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Berdasarkan argumen di atas maka dirumuskan hipotesis:

**H3:** Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **4. Hubungan antara Keserasian Belanja dengan Alokasi Belanja Modal.**

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase

dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Gerungan (2015) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa variabel keserasian belanja berpengaruh positif secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Penelitian ini juga ingin melihat pengaruh keserasian belanja ini terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan hipotesis sebagai berikut:

**H4:** Keserasian Belanja berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

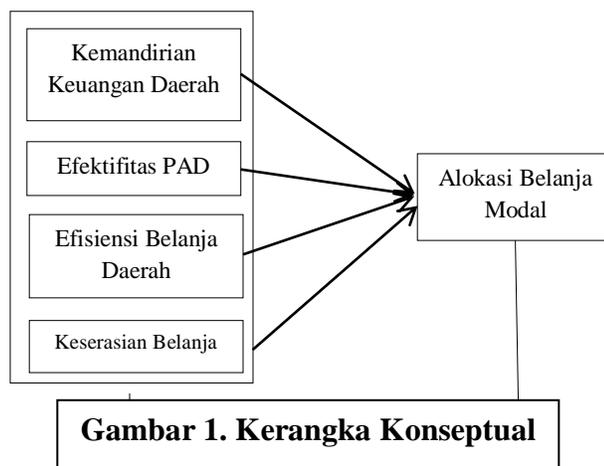
### **5. Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja Modal dengan Alokasi Belanja Modal.**

Kinerja keuangan daerah merupakan cerminan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kinerja keuangan yang bagus memberikan gambaran pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan baik, menggali potensi daerah yang menghasilkan PAD dengan maksimal sehingga tercipta kemandirian Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Pemerintah Daerah dengan kinerja keuangan meningkat diharapkan juga memberikan dampak terhadap meningkatnya Alokasi Belanja Modal sebagai cerminan pembangunan daerah. Gerungan, dkk (2015) mendapatkan hasil bahwa secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Tiara (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari argumen diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H5:** Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah dan Keserasian Belanja berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

Terkait penjabaran variabel diatas, maka dapat dibuat sebuah model kerangka berfikir seperti terlihat didalam gambar 1 dibawah ini:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian kausatif (causative). Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2004). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ), Efektivitas PAD ( $X_2$ ), Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ) dan Keserasian Belanja ( $X_4$ ) sebagai variabel independen terhadap Alokasi Belanja Modal ( $Y$ ) sebagai variabel dependen.

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran dan APBD seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Peneliti menjadikan seluruh populasi tersebut sebagai sampel (*total sampling*) yaitu seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data *time series* laporan realisasi anggaran dan APBD.

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dalam kurun waktu 2013 – 2017. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mendokumentasikan data dengan melakukan penghimpunan atas data-data yang telah ada (data sekunder) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pemaparan definisi operasional serta pengukuran variabel penelitian dapat dilihat pada uraian berikut ini

#### a. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah ( $X_1$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara PAD dengan Transfer Pusat/Provinsi dan Pinjaman, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian } i = \frac{\text{PAD } i}{\text{Total Pendapatan Daerah } i}$$

#### b. Efektivitas PAD

Efektivitas PAD ( $X_2$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Penerimaan PAD dengan Anggaran PAD, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

#### c. Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ), variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Total Belanja dengan Realisasi Total Pendapatan, dinyatakan dalam skala rasio dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

#### d. Keserasian Belanja

Keserasian Belanja (X4) variabel ini adalah variabel independen yang merupakan perbandingan antara Realisasi Belanja Modal dengan Realisasi Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio.

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

#### e. Alokasi Belanja Modal

Alokasi Belanja Modal (Y), variabel ini adalah variabel dependen yang merupakan perbandingan antara Anggaran Belanja Modal dengan Anggaran Total Belanja, dinyatakan dalam skala rasio. Alokasi Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data belanja modal pada APBD di tahun berikutnya.

#### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memilih model mana yang paling tepat dalam menganalisa data panel dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan pemilihan model regresi data panel. Menurut Basuki dan Prawoto (2016) terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

##### 1. Uji Chow

Merupakan pengujian untuk menentukan model fixed effects atau common effects yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah jika  $p\text{-value} < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effects Model. Begitupun sebaliknya, jika  $p\text{-value} > \alpha$ , maka  $H_0$  diterima, dan model yang digunakan adalah Common Effects Model. (Baltagi, dalam Basuki dan Prawoto, 2016).

##### 2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effects* atau *random effects* yang paling tepat digunakan. Jika hasil Uji Hausman lebih besar ( $>$ ) dari nilai *Chi Square* ( $\chi^2$ ), maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effects Model*. Sebaliknya, jika hasil Uji Hausman lebih kecil ( $<$ ) dari nilai *Chi Square* ( $\chi^2$ ), maka  $H_0$  diterima, dan model yang digunakan adalah *Random Effects Model*.

##### 3. Uji Langrange Multiplier (Uji LM).

Merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah model random effects atau metode common effects yang lebih tepat digunakan. Jika Uji Chow menunjukkan model yang paling tepat adalah Common Effects Model, selanjutnya Uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah Random Effects Model, maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan apakah model common effects atau random effects yang paling tepat digunakan dalam meregresi data panel.

#### Uji asumsi klasik

##### 1. Uji normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dapat ditempuh dengan Uji Jarque-Berra (J-B test). Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai probability lebih besar dari 0,05.

## 2. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya sebaran titik dalam grafik analisis residual (scatter plot) yang tidak menyebar secara acak (systematic pattern) di sekitar 0 (around zero). Jika sebaran titik dalam grafik analisis residual (scatter plot) menyebar secara acak (unsystematic pattern) di sekitar 0 (around zero), maka indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu, heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui Uji Glejser. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi (Ghozali, 2011).

## 3. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel- variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*)  $< 10$  dan *tolerance*.  $> 0,10$ .

## 4. Uji Autokorelasi

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu Uji Durbin-Watson (DW test). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson dari hasil regresi dengan nilai tabel Durbin-Watson.

## Metode Analisis Data

### a. Analisis Regresi Berganda

Alat regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

### b. Uji F (F-Test)

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Prosedur pengujiannya yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada hasil uji statistik. Jika nilai signifikansi pada hasil uji statistik  $< 0,05$  maka hipotesis dapat diterima yang menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi pada hasil uji statistik  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### c. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t-statistik bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisa regresi menunjukkan kecil dari  $\alpha = 5\%$ , berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Provinsi Sumatera Barat secara administratif terdiri atas 19 Kabupaten/Kota. Dimana kabupaten terdiri dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten

Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat, Sementara kota terdiri dari Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Dalam penelitian ini, objek yang diobservasi adalah seluruh Kabupaten/Kota tersebut.

### **Statistik Deskriptif**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Nilai rata-rata (mean) Alokasi belanja modal Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 21.96. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 Alokasi belanja modal daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nilai rata-rata (mean) rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 9.33. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 rasio kemandirian keuangan daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Nilai rata-rata (mean) Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 104.22. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 Rasio Efektivitas PAD daerah secara garis besar telah mencapai 100 persen bahkan lebih. Nilai rata-rata (mean) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 98.37. Sementara nilai rata-rata (mean) rasio Keserasian Belanja daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2016 sebesar 20.87. Jika dilihat dari masing-masing Kabupaten/Kota, untuk tahun 2013-2016 rasio Keserasian Belanja daerah secara garis besar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

### **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Berdasarkan hasil Uji Chow diperoleh probabilitas Chi-square adalah 0,002 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*. Ketika model yang terpilih adalah Fixed Effects maka perlu dilakukan uji berikutnya, yaitu Uji Hausman (Hausman Test).

Berdasarkan hasil Uji Hausman nilai probability Uji Hausman sebesar 0.3240 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima, dan model yang lebih tepat digunakan adalah model *random effects*. Dikarenakan pada Uji Hausman telah terpilih model *Random effects*, maka tidak perlu lagi dilakukan Uji Langrange Multiplier (LM Test).

### **Hasil dan Uji Model**

#### **1. Uji F (*F-Test*)**

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikan pada 0,000 (sig 0,000 < 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix. maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama.

#### **2. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan nilai Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,924. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah mempunyai kontribusi menjelaskan Alokasi Belanja Modal sebesar 92.4 persen sedangkan sisanya 7.6 persen

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### **3. Uji Hipotesis (*t-Test*)**

#### **Hipotesis 1**

Nilai probabilitas sebesar 0.3979 lebih besar ( $>$ ) dari 0,05, maka  $H_1$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

#### **Hipotesis 2**

Nilai probabilitas sebesar 0.7636 lebih besar ( $>$ ) dari 0,05, maka  $H_2$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efektivitas PAD (X2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

#### **Hipotesis 3**

Nilai probabilitas sebesar 0.0231 lebih kecil ( $<$ ) dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.

#### **Hipotesis 4**

Nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil ( $<$ ) dari 0,00, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keserasian Belanja (X4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.

#### **Hipotesis 5**

Hasil Uji F Dengan melihat Prob (F-statistic) dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Sumatera Barat.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal**

Penelitian ini menghasilkan koefisien persamaan regresi dengan nilai sebesar 0.0477 untuk variabel independen Kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan Kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif terhadap Alokasi belanja modal Koefisien regresi sebesar 0.0477 artinya setiap peningkatan 1 persen Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.0477 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Nilai probabilitas sebesar 0.3979 lebih besar ( $>$ ) dari 0,05, maka  $H_1$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan Daerah (X1) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan bahwa daerah di wilayah Sumatera Barat telah sanggup untuk menerima tugas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri sehingga diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa

tengah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Ardhini dan Handayani (2011), dalam penelitiannya tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan di kabupaten/kota di Jawa Tengah menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. Assyurriani (2015) menemukan hasil bahwa rasio tingkat kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Efektivitas PAD Dengan Alokasi Belanja Modal**

Penelitian ini menghasilkan koefisien persamaan regresi dengan nilai sebesar  $-0.0037$  untuk variabel independen efektivitas PAD. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD memiliki hubungan negatif terhadap Alokasi belanja modal. Koefisien regresi negatif variabel independen Efektifitas PAD ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa Efektifitas PAD memiliki hubungan negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Koefisien regresi sebesar  $-0.0037$  artinya setiap peningkatan 1 persen Rasio Efektifitas PAD, maka Alokasi Belanja Modal akan menurun sebesar 0.0037 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri Retno (2017) tentang analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal dimana jika rasio efektivitas PAD naik 1% maka belanja modal turun sebesar 0.001876.

Selanjutnya penelitian Eko Indra Praza (2016) tentang Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi menemukan bahwa Rasio Efektifitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya penelitian Kadek (2015) menemukan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Assyurriani (2015) juga menemukan hasil bahwa efektivitas PAD daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Efisiensi Keuangan Dengan Alokasi Belanja Modal**

Koefisien regresi positif variabel independen Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ) menunjukkan bahwa Efisiensi Keuangan Daerah memiliki hubungan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Koefisien regresi sebesar 0.1214 artinya setiap peningkatan 1 persen Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.1214 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Nilai probabilitas sebesar 0.0231 lebih kecil ( $<$ ) dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Keuangan Daerah ( $X_3$ ) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dinarossi (2016) tentang Penelitian ini berjudul Efisiensi Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Di Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel efisiensi keuangan daerah dan variabel kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 97,12 persen. Sedangkan secara parsial, masing-masing variabel mempunyai arah yang sesuai dengan teori dimana kedua variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2015), Gerungan dkk, (2015) dan

penelitian Joko (2014) yang menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

### **Pengaruh Keserasian Belanja Dengan Alokasi Belanja Modal**

Koefisien regresi positif variabel independen Keserasian Belanja Daerah ( $X_4$ ) menunjukkan bahwa Keserasian Belanja Daerah memiliki hubungan positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Koefisien regresi sebesar 1.0349 artinya setiap peningkatan 1 persen Rasio Keserasian Belanja Daerah, maka Alokasi Belanja Modal akan meningkat sebesar 1.0349 persen. Dalam hal ini faktor lain dianggap tetap. Nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil ( $<$ ) dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Keserasian Belanja ( $X_4$ ) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal daerah di Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gerungan, dkk (2015) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keserasian Belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Begitu juga dengan hasil penelitian Asepma, dkk (2011) yang menunjukkan bahwa Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan dan Keserasian Belanja secara bersama-sama dengan Alokasi Belanja Modal.**

Hasil Uji F dapat dengan melihat Prob (F-statistic) dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa variabel Kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja di Sumatera Barat. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) juga dapat dilihat pada Tabel 4.7. Dengan melihat R-squared dapat dijelaskan bahwa nilai Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,924. hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, Efisiensi keuangan dan keserasian belanja daerah mempunyai kontribusi menjelaskan Alokasi Belanja Modal sebesar 92.4 persen sedangkan sisanya 7.6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Gerungan, dkk (2015) yang mendapatkan hasil bahwa secara simultan variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, efektivitas Belanja Modal, Efisiensi, dan Keserasian Belanja berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Tiara (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.
2. Efektivitas PAD tidak berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi sumatera barat tahun 2013 – 2017.

3. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013 – 2017.
4. Keserasian Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat tahun 2013 – 2017.
5. Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah dan Keserasian Belanja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.

### **Saran**

1. Alokasi belanja modal di Sumatera Barat secara simultan dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang diproxikan oleh variabel Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah dan Keserasian Belanja. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Belanja Daerah dan Keserasian Belanja.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas PAD berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bahwa dalam melakukan pengeluaran daerah, tidak semata-mata melalui pengalokasian belanja modal secara langsung, melainkan dapat mempertimbangan pengeluaran untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti rasio likuiditas, dan solvabilitas, sehingga hasil penelitian lebih representatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali). Simposium Akuntansi 9. Padang.
- Arsa, I. K dan Setiawina Nyoman Djinar. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. Tesis (tidak dipublikasikan) Pascasarjana Universitas Udayana.
- Bastian, I.. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Basuki, Agus Tri, dan Prawoto, Nano. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fees, Warren Reeve. (2008). *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21. Salemba Empat. Jakarta.
- Gerungan Sylvia Febriany, Saerang David P.E. dan Pontoh Winston. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten / Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Sam Ratulangi
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. (2004). *Basic Econometrics*. Fourth Edition. USA: The McGraw-Hill Companies.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Jakarta: Salemba empat.

- Irsyadi, Muh Adib. (2014) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal (Studi empiris pada pemerintah kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah). Skripsi thesis (tidak dipublikasikan), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Pramono, Joko. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah STIE AMA Salatiga*, 7(13).
- Prihastuti Asepma Hygi, Taufik Taufeni, dan Agusti Restu. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau*, 10(2), 143 – 154.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Saputra. Fegi. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Laporan Arus Kas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Skripsi Dipublikasikan.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods for Business*, 4th Edition. Jakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. (2011). *Research Methods for business Edisi I and 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susantih Heny dan Saftiana Yulia (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal ilmiah*, Vol.12. Universitas Indonesia.
- Suwandi Kurni Adi dan Tahar Afrizal. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah*, 11(2 ), 118 – 136.
- Tiara, Ferani Ingrid. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Skripsi Dipublikasikan. Universitas Brawijaya.
- Todaro, Michael P. and Smith Stephen C., 2003, *Economic Development*, Eighth Edition, United Kingdom : Pearson Education Limited.
- Utami Dinarossi dan Yanti Darma. (2016). Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal. *Jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah*, 2(2).
- Widarjono, Agus. (2015). Analisis Multivariat Terapan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/22/ov364t370-serapan-anggaran-sumbar-masih-lambat>. Terakhir diakses 01 Desember 2018.
- <http://m.valoraco.id/berita/10655/inilah-catatan-pemprov-sumbar-untuk-pengalokasian-anggaran-di-apbd-2019.html>. Terakhir diakses 01 Desember 2018.